

No. Induk :
220200396

No. Panggil :
A KSK 132

SUAP ORANG DEKAT

SEPEKAN setelah lengser, bekas Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dua anak buahnya karena diduga menerima suap dari petinggi PT Summarecon Agung Tbk pada Kamis siang, 2 Juni lalu. Sang "AB 1"—begitu Suyuti sering disebut—dituding menerima besel izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Pemerintah Kota Yogyakarta ditengarai mengobral izin pendirian hotel, restoran, dan apartemen sejak 2013. Ia memiliki tim khusus berisi orang-orang dekat untuk mengatur izin.

APARTEMEN ROYAL KEDHATON

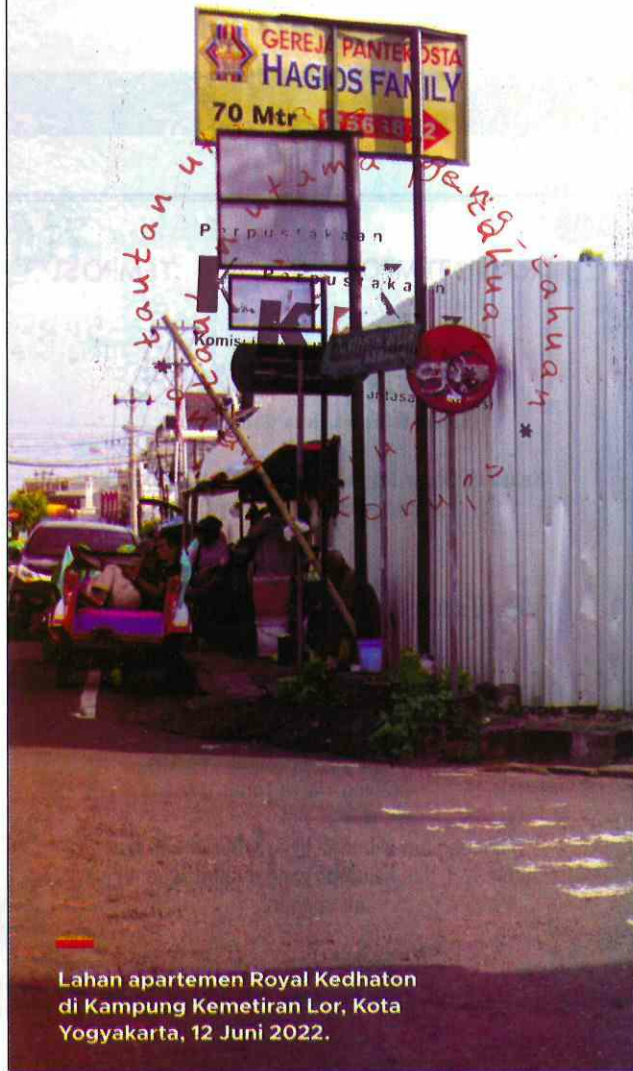
Konsep: Apartemen bergaya modern dengan ornamen gaya eklektik yang mencirikan detail bangunan berkultur lokal Yogyakarta dan Cina.



14 lantai setinggi 40 meter
Luas: 6.051 meter persegi



Lokasi: Jalan Gandekan dan Jalan Kemetiran Lor (*hoek*), kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta.



Lahan apartemen Royal Kedhaton di Kampung Kemetiran Lor, Kota Yogyakarta, 12 Juni 2022.

TERSANGKA » PENERIMA SUAP » PEMBERI SUAP



1. HARYADI SUYUTI

Wali Kota Yogyakarta periode 2011-2016 dan 2017-2022

Peran:

- ▼ Menerima suap izin mendirikan bangunan (IMB) seperti hotel, penginapan, dan restoran.
- ▼ Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera menerbitkan IMB meski ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi.
- ▼ Memiliki tim khusus di bawah komando orang dekat dengan sebutan "AB 1,5".

2. NURWIDHIHARTANA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peran: Turut menerima suap.

3. TRIYANTO BUDI YUWONO

Sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti

Peran: Menjadi perantara penerima suap.

OON NUSIHONO

Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk

Peran: Mendekati Haryadi agar memperoleh izin mendirikan bangunan untuk apartemen Royal Kedhaton dan memberi uang pelicin.

PENERAPAN PASAL

Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PENERAPAN PASAL

Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SEBAR IZIN

Perizinan hotel yang diterbitkan sejak akhir 2013:

100 lebih

Tarif suap perizinan:

Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar

BARANG BUKTI:

US\$ 27.258

atau sekitar Rp 440 juta, juga penyerahan bertahap sekitar Rp 50 juta.

ORANG DEKAT

DANDAN JAYA KARTIKA

Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak usaha PT Summarecon Agung Tbk

Peran:

- ▼ Mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan mengatasnamakan PT JOP untuk apartemen Royal Kedhaton.
- ▼ Mendekati orang-orang Haryadi.

MUHAMMAD SURYO

Direktur PT Surya Utama Kalaka

Peran: Berperan sebagai makelar dan memberikan sosialisasi ke masyarakat. Pengurusan permohonan IMB yang ia ajukan juga bermasalah.

KEJANGGALAN IZIN

- ▼ Ketidaksih sesuai dasar aturan bangunan khususnya terkait dengan tinggi bangunan. Tinggi apartemen direncanakan 40 meter, padahal salah satu peraturan daerah mengatur tinggi maksimal bangunan untuk kepentingan ekonomi 32 meter di atas permukaan tanah atau sekitar delapan lantai.
- ▼ Posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.
- ▼ Tidak mendapat persetujuan dari warga sekitar.
- ▼ Perizinan awalnya untuk kondotel.

BEDA PEMIMPIN, BEDA IZIN

Prosedur perizinan sebelum era Wali Kota Haryadi Suyuti

- ▼ Pengusaha mengajukan permohonan izin ke Dinas Kebudayaan.
- ▼ Tim Ahli Cagar Budaya menilai kelayakan izin bangunan dengan kriteria: ketinggian bangunan, bentuk fasad, tergolong cagar budaya atau bukan.
- ▼ Hasil penilaian/rekomendasi akan diteruskan ke Dinas Perizinan.
- ▼ Dari 182 permintaan izin per 2011, hanya lima yang disetujui.

PROSEDUR PERIZINAN ERA WALI KOTA HARYADI SUYUTI

- ▼ Tim Ahli Cagar Budaya dihapus karena dianggap menghambat investasi.
- ▼ Pemberian rekomendasi kepada Dinas Perizinan dialihkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan.
- ▼ Dinas Perizinan memiliki tim khusus yang menangani izin mendirikan bangunan secara kilat dengan melibatkan makelar/operator lapangan.

Berikut ini rinciannya:

Pengusaha. Mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan ke Dinas Perizinan, sekarang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Makelar/Operator Lapangan. Para pengusaha biasanya menggunakan jasa makelar untuk melobi para kepala dinas

Orang Dekat. Makelar mengontak orang dekat Haryadi. Lewat kaki tangan, para pihak menyepakati ongkos pelicin penerbitan izin. Atas seizin Haryadi, orang dekat itu menelepon kepala dinas untuk memproses izin.

“Untuk memuluskan permohonan izin tersebut, ON dan Dandan Jaya diduga mendekati dan berkomunikasi secara intens serta bersepakat dengan HS, yang saat itu menjabat Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022.”

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

“Sudah kami instruksikan bagian perizinan untuk mencermati dokumen-dokumen IMB yang terindikasi bermasalah.”

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi

NASKAH: LINDA TRIANITA, SHINTA MAHARANI (YOGYAKARTA). **SUMBER:** KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, WAWANCARA, Riset dari Berbagai Sumber. **FOTO:** TEMPO/SHINTA MAHARANI (LAHAN), TWITTER/@HARYADI_SUYUTI (HARYADI), ANTARA/EKA ARIFA RUSQIYATI (NURWIDHI), TEMPO/IMAM SUKAMTO (TRİYANTO, OON)